

POLEMIK AL ZAYTUN DAN POPULISME DALAM MODERASI BERAGAMA JELANG PEMILU 2024

Nihayatur Rohmah¹, Wening Purbatin Palupi Soenjoto²

Institut Agama Islam Ngawi, Istikom Jombang Jawa Timur

Email: nihayaturrohmah1@gmail.com

Abstract: Background to the problem: Based on data from the Central Bureau of Statistics, it was stated that in mid-2023, the population of Indonesia was 278.69 million. There was an increase of 1.09% from the previous year. The increasing number of productive ages led to an explosion of demographic bonuses in Indonesia. The increasing number of people vulnerable to various types of conflict and the most vulnerable and sensitive conflict is religious conflict. The Indonesian government has begun implementing religious moderation as a form of anticipation of religious conflict. The Al Zaytun Indramayu Polemic in West Java is a religious conflict, which is considered to have committed blasphemy in the form of implementing worship at the Al Zaytun Islamic Boarding School which is different from Islamic teachings and is linked to the issue of populism ahead of the 2024 election. This study aims to analyze descriptively the polemic of Al Zaytun, populism in the application of religious moderation ahead of the 2024 election. Research Method: in this study using qualitative methods with a literature review approach and news on digital media. Research Conclusion: Understanding religious moderation in framing the Al Zaytun controversy news is indeed It is inevitable that there will be conflicts, differences in the pattern of worship carried out by the Al Zaytun Islamic Boarding School in the concept of understanding of the Indonesian people who are predominantly Muslim, causing polemics and considered controversy for Muslims who are used to worshipping according to the teachings of the Islamic religion. political intrigue ahead of the 2024 election. Religious moderation is an important thing that must be reviewed if it is linked to the Al Zaytun polemic so that the meaning in implementing religious moderation does not justify teachings that are proven to be contrary to Islamic religious law. Religious moderation mediated in digital space is news that shapes diversity opinions and conflicts that need to be handled by all related parties in a win-win solution.

Keywords: Al Zaytun, religious moderation, populism, 2024 election

Abstrak: Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dinyatakan pada pertengahan tahun 2023, jumlah penduduk Indonesia 278.69 juta jiwa. Ada kenaikan 1.09% dari tahun sebelumnya. Jumlah usia produktif yang makin meningkat menyebabkan adanya ledakan bonus demografi di Indonesia. Meningkatnya jumlah penduduk rentan ragam konflik dan konflik paling rentan dan sensitif adalah konflik beragama. Pemerintah Indonesia mulai menerapkan moderasi beragama sebagai bentuk antisipasi terjadinya konflik beragama. Polemik Al Zaytun Indramayu Jawa Barat merupakan konflik beragama, yang dinilai melakukan penistaan agama dengan bentuk penerapan ibadah di ponpes Al Zaytun berbeda dengan ajaran Islam dan dikaitkan adanya isu populisme jelang pemilu 2024. Penelitian bertujuan menganalisa secara deskriptif polemik Al Zaytun, populisme dalam penerapan moderasi beragama jelang pemilu 2024. Metode Penelitian: pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka dan berita di media digital. Kesimpulan Penelitian: Memaknai moderasi beragama dalam framing berita kontroversi Al Zaytun memang tidak dapat dihindari adanya konflik, perbedaan pola beribadah yang dilakukan ponpes Al Zaytun dalam konsep pemahaman masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim, menimbulkan polemik dan dinilai kontroversi bagi umat muslim yang sudah terbiasa beribadah sesuai ajaran agama Islam semestinya. Polemik Al Zaytun pun dianggap pemicu munculnya populisme dan intrik politik jelang pemilu 2024. Moderasi beragama menjadi hal penting yang harus dikaji ulang jika dikaitkan polemik Al Zaytun sehingga pemaknaan dalam penerapan moderasi beragama tidak menghalalkan ajaran yang terbukti bertentangan dengan syariat agama Islam. Moderasi beragama yang dimediasi dalam ruang digital menjadi sebuah berita yang membentuk ragam opini dan konflik yang perlu ditanggulangi semua pihak terkait dengan cara win win solution.

Kata kunci: Al Zaytun, Moderasi Beragama, populisme, pemilu 2024

Received ; 30 Agustus 2024; Accepted ; 28 September 2024; Published ; 30 September 2024



Al-Mabsut

Jurnal Studi Islam dan Sosial

Vol. 18 No.2 September 2024

DOI: 10.56997/almabsut.v18i2.1620

The article is published with Open Access Journal at <https://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut>
Al-Mabsut Studi Islam & Sosial by LP2M IAI Ngawi is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Based on a work at <http://ejournal.iaingawi.ac.id/>

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki 6 agama resmi yang diakui yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Khonghucu. Keragaman agama di Indonesia membutuhkan adanya sikap saling menghormati dan menghargai masing-masing agama. Memahami pluralisme agama bukanlah serta merta mencampuradukkan semua agama menjadi 1 acuan dengan dalih Tuhan itu satu atau Tuhan itu sama. Karena setiap agama memiliki pemahaman berbeda-beda dalam hakikat Tuhan dengan bentuk peribadatan yang berbeda pula. Walaupun Indonesia merupakan negara mayoritas muslim, masihlah membutuhkan proses penerimaan jika ada perbedaan makna ke-Islaman sebuah kaum atau komunitas yang dianggap mencolok perbedaannya, terutama yang dinilai sudah menyimpang dari kaidah-kaidah agama Islam. Sudah dijelaskan dalam Al Qur'an semua bentuk peribadatan dan berkehidupan umat Islam. Terpelihara secara turun temurun, bersemayam pada hati orang-orang yang berilmu dan bertaqwa kepada Allah SWT. Seperti yang dijelaskan pada surah Al Ankabut ayat 49: Artinya Sebenarnya, ia (Alquran) adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang berilmu. Tidaklah mengingkari ayat-ayat Kami, kecuali orang-orang zalim. (QS Al-Ankabut: 49).¹⁰⁰²

Unggahan video di kanal Ruang Indonesia pada tanggal 29 Juni 2023 yang menyatakan FPI (Front Pembela Islam) membakar pondok pesantren Al Zaytun Indramayu Jawa Barat memang merupakan berita hoax namun menjadi embrio viralnya pemberitaan tentang kontroversi dan dianggap ajaran sesat yang terjadi di ponpes Al Zaytun. Berita-berita sebelumnya tentang ponpes Al Zaytun memang tidaklah segaduh tahun 2023 ini. "Majalah Detik Online edisi 58 tahun 2013 yang membahas tentang penyekapan di Ponpes Al Zaytun, diteliti oleh Nisa Chaerani Hisan dalam skripsinya yang berjudul 'Analisis Wacana Berita Penyekapan di Pondok Pesantren Al Zaytun dalam Majalah Detik Online edisi 58 (07-13 Januari 2013)'¹⁰⁰³". Tahun 2013 masih belum banyak ragam media sosial di Indonesia sehingga cenderung berita tidak banyak diketahui masyarakat luas. Komunikasi era digital melalui media sosial sangat memudahkan informasi menjadi arus deras untuk direspon secara beragam karena sebelum ramainya pemberitaan ponpes Al Zaytun di tahun 2023 ini, berita-berita yang berkembang tidaklah dianggap kontroversi dan sesat. Berkembangnya sebuah berita di era komunikasi digital akan cepat viral kala diramu dengan isu-isu yang menarik dan berdampak psikologis. Terutama jika berita Al Zaytun yang mengandung isu-isu politik seperti jelang pemilu 2024 yang akan datang maka *politic framing* dan *social framing* menjadi bumbu penyedapnya.

MASALAH

Munculnya kasus Al Zaytun yang dinilai sebagai penistaan agama menguak pertanyaan: a. Apakah masyarakat Indonesia belum memahami adanya pluralisme agama sehingga kasus ponpes Al Zaytun menjadi viral. b. Apakah menerima pluralisme agama adalah menerima ajaran ponpes Al Zaytun yang dinilai bertentangan dengan syariat agama Islam. c. Apakah kasus Al Zaytun diangkat karena dipengaruhi intrik politik jelang pemilu 2024. Untuk menganalisa dan mengungkap secara deskriptif tentang pola asimilasi dan pluralisme agama dalam memahami kontroversi tentang ponpes Al Zaytun

METODE

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka. Alasan pemilihan metode ini adalah karena sumber data dan hasil penelitian dalam penelitian kepustakaan (library research) berupa deskripsi verbal. Moleong menjelaskan beberapa karakteristik penelitian kualitatif, antara lain: Penelitian dilakukan dalam setting alami, Peneliti sendiri berperan sebagai alat pengumpul data, Fokus pada data

¹⁰⁰² Al Qur'an surah Al Ankabut ayat 49

¹⁰⁰³ <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/33580>

non-numerik, Proses analisis dimulai dari data spesifik menuju ke generalisasi, Teori dibangun berdasarkan data yang dikumpulkan, Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka, Desain penelitian berkembang sesuai dengan kenyataan lapangan. Dengan demikian, penelitian ini memastikan bahwa metode dan karakteristik penelitian kualitatif dipenuhi secara sistematis dan ilmiah.¹⁰⁰⁴ Pada penelitian ini merupakan hasil proses mengupas dan menganalisa secara deskriptif kasus ponpes Al Zaytun Indramayu Jawa Barat dikaitkan dengan isu politik jelang pemilu 2024. Kebaruan pada penelitian ini menitikberatkan pengungkapan analisa berdasarkan kajian pustaka dengan keadaan realita di lapangan yang belum pernah diteliti sebelumnya. Menemukan benang merah antara muncul viralnya kasus penistaan agama yang dilakukan pondok pesantren Al Zaytun dengan eforia politik jelang pemilu 2024. pada penelitian untuk a.menganalisa dan mengungkap secara deskriptif moderasi beragama pada polemik ponpes Al Zaytun berdasarkan kajian pustaka dan media digital.b.Apakah viral Al Zaytun dipicu adanya populisme politik jelang pemilu 2024.

PEMBAHASAN

1. Moderasi Beragama di Era Komunikasi Digital

Indonesia mulai menerapkan moderasi beragama sebagai bentuk meminimalisir terjadinya konflik. Menjaga keseimbangan dengan menghargai batas-batas yang dapat dikendalikan berdasarkan menghindari kekerasan, keekstreman dalam batas kemoderatan. Bukan mengambil jalan pintas, melainkan jalan tengah sebagai jalan yang terbaik bagi semua pihak. Membahas antara agama dan politik akan menjadi ranah sensitive dan mengundang ragam justifikasi. Indonesia termasuk negara dengan penduduknya yang masih minim literasi sehingga rentan adanya hoax, terutama hoax pada media sosial. Berita palsu atau hoax sering kali lebih banyak muncul di media sosial, karena platform ini memungkinkan orang untuk menyebarkan isu tanpa tanggung jawab. Untuk mengatasi masalah ini, Ditjen IKP Kemkominfo bekerja sama dengan MUI Pusat mengadakan literasi media yang bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat. Edukasi ini diharapkan dapat mendorong peserta untuk membuat konten positif yang mendidik, mencerahkan, dan memberdayakan masyarakat, serta menumbuhkan semangat kebersamaan dan toleransi dalam bingkai negara kesatuan Indonesia. Dirjen IKP juga berharap agar peserta dapat aktif dalam memilih dan memverifikasi informasi yang mereka temukan di media sosial, serta menyaring konten negatif. Hal ini penting karena selain informasi yang bermanfaat, media sosial juga dipenuhi dengan konten yang berisi ujaran kebencian, hoax, fitnah, dan provokasi yang dapat memecah belah masyarakat.¹⁰⁰⁵

Perkembangan manusia di era peradaban teknologi yang menuntut selalu mengadaptasi keadaan aktivitas sehari-hari dengan bantuan kemudahan teknologi. Tak pelak, komunikasi di era digital pun memiliki banyak kemudahan yang juga mengandung resiko yang harus diolah secara matang dan dewasa. Namun tidak pula menjamin kemudahan komunikasi mengurangi resiko negatif dan kesalahpahaman dalam berkomunikasi.

Asimilasi budaya yang mengakibatkan regresi budaya yang terjadi di Indonesia merupakan maldaptif perkembangan jaman yang pesat disertai kemajuan teknologi dan ketidaksiapan mental dalam merespon pengaruh-pengaruh dari negara-negara lain yang berbeda jauh dengan budaya Indonesia. Namun pengaruh informasi digital, kanal-kanal informasi digital audio visual mampu membentuk perubahan-perubahan baru yang tak pelak memunculkan *culture shock*. Derasnya informasi yang direspon minim literasi dan

¹⁰⁰⁴ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 8-13

¹⁰⁰⁵ https://www.kominfo.go.id/content/detail/11354/dirjen-ikp-pencegahan-hoax-tanggung-jawab-bersama/0/sorotan_media

filterisasi sangat memudahkan pengaruh-pengaruh buruk, terutama bagi generasi mudanya. Alih-alih mengikuti perkembangan jaman namun walhasil munculnya perubahan-perubahan yang mengikis budaya Indonesia. Pada kasus Al Zaytun yang dinilai dipengaruhi ajaran Yahudi. Dimulai dari pengucapan salam hingga adanya sinagoge yaitu tempat beribadah kaum Yahudi. Sinagoge dibangun tidak hanya sebagai tempat ibadah bagi penganut Yahudi, tetapi juga sebagai pusat untuk calon penganut dan kegiatan keagamaan lainnya. Fungsi utama sinagoge, menurut para ahli, adalah untuk melaksanakan ibadah, terutama pada hari Sabat dan hari-hari besar lainnya. Di sinagoge, pembacaan Taurat dan doa juga sering dilakukan. Selain itu, sinagoge juga berfungsi sebagai tempat belajar agama Yahudi dan pertemuan warga untuk membahas berbagai isu keagamaan, sosial, dan politik. Di beberapa lokasi, keberadaan laki-laki dan perempuan di sinagoge dipisahkan. Dalam struktur organisasional sinagoge, terdapat beberapa petugas dengan tugas spesifik. Pertama, ada Arkôn, yang bertindak sebagai kepala sinagoge dengan tanggung jawab mengatur ketertiban dan mengawasi ibadah. Khazzân adalah petugas yang bertanggung jawab atas pekerjaan kasar, kepengawasan, dan administratif, termasuk merawat sinagoge dan perabot serta kitab-kitabnya. Khazzân juga bertugas memproklamasikan hari besar dari atas gedung. Syeliakh Sibûr berperan sebagai pelafal doa selama ibadah di sinagoge. Syarat untuk menjadi Syeliakh Sibûr meliputi: rajin, dewasa, kepala keluarga, tidak kaya, bukan pedagang, memiliki suara nyaring, dan bijak dalam pengajaran. Awalnya, posisi Syeliakh Sibûr bukanlah sebuah jabatan tetap, melainkan seseorang yang dipanggil khusus untuk menjalankan tugas-tugas tersebut. Seringkali, posisi ini dirangkap oleh Khazzân, sehingga keduanya menjadi satu. Dalam konteks toleransi antaragama, Panji Gumilang, pimpinan Ponpes Al Zaytun, mengajak santrinya untuk menyanyikan "Havenu Shalom Alachem", sebuah ucapan salam yang ditujukan untuk umat Kristiani, sebagai bentuk toleransi terhadap penganut agama lain. Ponpes Al Zaytun sering menggelar acara pada Malam 1 Muharram, menunjukkan komitmen mereka terhadap kegiatan keagamaan dan sosial.¹⁰⁰⁶

Jika memaknai moderasi beragama dengan mengkaitkan mencuatnya berita kontroversi ponpes Al Zaytun memang haruslah ditelaah secara seksama dan berkelanjutan karena ajaran yang diterapkan ponpes Al Zaytun memanglah menyimpang dari syariat Islam. Namun yang jadi pertanyaan adalah, mengapa baru tahun ini kasus ini mencuat, sedangkan ponpes Al Zaytun sudah lama berdiri dan memiliki ribuan santri. Ada apa sebenarnya yang menjadi pemicu viralnya berita Al Zaytun di semua media massa dan media sosial. Apakah moderasi beragama sudah dapat diterima oleh masyarakat Indonesia sehingga ajaran Al Zaytun yang sudah diterapkan dari tahun 1993 yang lalu. Apakah ada pemicu yang sengaja dikuakkan menjelang pemilu 2024 sebagai sarana *psychologist war* agar kondisi politik di Indonesia menjadi memanas. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat menjadi acuan dalam menganalisa kasus al Zaytun secara kajian pustaka dengan membandingkan beberapa referensi mengenai ponpes Al Zaytun.

Dialektika keagamaan di Indonesia yang masih minim literasi dan kurang pekanya dalam memahami perubahan dan regresi budaya dapat menjadi media bahaya laten yang mencampuradukkan antara asimilasi budaya dan moderasi beragama yang rentan pada kerusakan kerukunan beragama dan fenomena tersebut sudah dijelaskan juga dalam Al Qur'an surah Yunus ayat 40-41:

Artinya: "Dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya (Al-Qur'an), dan di antaranya ada (pula) orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat

¹⁰⁰⁶ <https://www.insertlive.com/hot-gossip/20230623104754-7-312899/soal-salam-yahudi-al-zaytun-kita-menganut-aliran-toleransi>

kerusakan."(QS.Yunus:40)¹⁰⁰⁷.

" Jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah: "Bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan".(QS. Yunus:41)¹⁰⁰⁸.

Menelaah dan memaknai surah Yunus ayat 40-41 jelas dibuktikan bahwa selain orang-orang beriman yang menjalankan syariat Islam berdasarkan Al Quran dan hadist maka ada pula kelompok-kelompok yang membuat kerusakan yang tidak sesuai aturan ibadah agama Islam semestinya atau penyimpangan yang dilakukan seolah adalah hal yang wajar dan wajib dilakukan oleh para santri dan seluruh civitas akademika ponpes Al Zaytun, pembiasaan ibadah yang dilakukan sebagaimana yang diterapkan ponpes Al Zaytun sudah menyalahi aturan yang diperintahkan Allah SWT.

Panji Gumilang selaku pimpinan Al Zaytun yang mempertegas aturan-aturan yang diterapkan sudah sesuai dengan kurikulum pendidikan di Indonesia dengan predikat akreditasi A. Aturan yang diterapkan dalam akreditasi tidak memeriksa secara detail secara penerapan ibadah yang dilakukan pada ponpes Al Zaytun sehingga pada penilaian akreditasi hanya ada kurikulum pembelajaran yang disesuaikan dengan aturan pendidikan Indonesia. Penyimpangan dalam penerapan solat berjamaah sudah merusak tatanan aturan solat berjamaah yang sesuai syariat Islam. Solat berjamaah di ponpes Al Zaytun menerapkan prai dan wanita solat salam shaf yang sama. Dilansir detik Jabar Senin (24/4/2023), terlihat bahwa saf salat di Ponpes Al-Zaytun dibuat berjarak, dan ada jemaah perempuan yang berada di depan. Selain itu, ada juga jemaah wanita yang duduk di saf pertama untuk mendengarkan khutbah. Ketua MUI Kabupaten Indramayu, KH Satori, mengaku tidak memahami tata cara peribadatan yang dilakukan oleh Ponpes Al-Zaytun. Dia mengatakan bahwa jemaah wanita berada di barisan belakang laki-laki, meskipun secara hukum tidak haram dan tidak membatalkan salat. KH Satori juga mempertanyakan adanya jarak antar saf seperti di masa pandemi COVID-19. Karena masa pandemi telah berakhir, seharusnya tidak ada lagi jarak antar saf."¹⁰⁰⁹

Perihal pelaksanaan salat berjamaah di Ponpes Al-Zaytun mendapat tanggapan dari Kyai Marsudi Syuhud, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, pada tanggal 24 Maret 2023. Ia menyatakan bahwa mengenai keabsahan salat tersebut, mayoritas fuqaha menjelaskan bahwa campur baurnya laki-laki dan perempuan dalam salat tetap dianggap sah. Namun, meskipun sah, pelaksanaan tersebut dianggap makruh, yang berarti tidak disukai oleh Allah SWT. Kyai Marsudi menekankan bahwa tata cara beribadah sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah SWT telah diatur sejak zaman dahulu. Aturan-aturan ini telah diajarkan sejak zaman para nabi, di mana ibadah kepada Allah SWT memiliki ketentuan dan hukum tertentu. Selain itu, terdapat aspek penting yang perlu diperhatikan dalam setiap ibadah, yaitu adab. Menurut Kyai Marsudi, beribadah kepada Allah tidak hanya sekadar memenuhi syarat sah, tetapi juga harus memperhatikan adab kesopanan yang telah diajarkan oleh para ulama terdahulu. Al-Zaytun menjadi topik perbincangan yang merujuk pada acuan-acuan yang dijustifikasi oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim. Hal ini menyebabkan informasi yang muncul di media massa dan media sosial menjadi sangat informatif dan situasional.

Kesuksesan menarik para santri di awal berdirinya Ma'had Al-Zaytun tidak lepas dari visi misi yang jelas. Visi misi ini terungkap dalam moto "Al-Zaytun Pusat Pendidikan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian," yang berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan dengan penanaman nilai-nilai perdamaian dan toleransi. Selain itu,

¹⁰⁰⁷ Al Qur'an surah Yunus ayat 40

¹⁰⁰⁸ Al Qur'an surah Yunus ayat 41

¹⁰⁰⁹ <https://www.detik.com/sumut/berita/d-6687732/heboh-pria-dan-wanita-satu-saf-saat-salat-id-di-ponpes-al-zaytun>

Ma'had Al-Zaytun juga memiliki moto "Pesantren Spirit but Modern System," yang menunjukkan bahwa lembaga ini memiliki semangat tradisional pesantren dengan menggunakan sistem modern. Lembaga ini diharapkan akan dihuni oleh santri yang berakhlak mulia, berilmu luas, berpikiran bebas, dan berbadan sehat (Majalah Al-Zaytun Edisi 15/2001).¹⁰¹⁰ Polarisasi komunikasi yang dibangun dalam ponpes Al Zaytun memang terlihat begitu membangun jiwa nasionalisme terhadap negara dengan sistem penerapan ibadah yang jauh berbeda dengan pesantren pada umumnya.

2. Al Zaytun Dan Isu Populisme Dalam Ranah Politik Di Ruang Digital

Pada ruang digital yang merangkum semua cerita, berita maupun fenomena yang terjadi di masyarakat. Satu sisi masyarakat seolah haus akan informasi namun di sisi lain masyarakat menjadi mudah terpengaruh akan berita-berita yang sedang viral tanpa meneliti lebih teliti dan sumber-sumber yang akurat. Berita yang "digoreng" dengan "bumbu penyedap" terutama dari isu-isu politik jelang pemilu 2024 ini sangat memberikan perhatian yang beragam pula dari masyarakat. Komunikasi yang dibangun dengan berita yang panas dan viral mampu menggerakkan masyarakat luas untuk ikut penasaran mengikuti berita yang sedang viral. Dan kasus ponpes Al Zaytun menjadi viral ala beritanya muncul di media digital. Pembungkain berita-berita terkait Al Zaytun yang beragam menimbulkan spekulasi masyarakat ikut berpendapat. Masyarakat seolah menjadi hakim-hakim yang siap menjustifikasi atas pola pendidikan dan penerapan ibadah di ponpes Al Zaytun. Hal demikian terjadi karena pada era ini rata-rata masyarakat sudah memiliki alat gawai atau media digital lainnya yang dapat mengakses berita kapan saja untuk saling berbagi berita.

Reaksi keras yang muncul dapat dipahami karena Indonesia merupakan negara dengan penduduk yang mayoritas Islam. Pemicu yang terjadi ditenggarai pula karena adanya faktor-faktor politik. Terjadinya populisme Islam dikaitkan dengan politik menjadi makin polemiknya kasus Al Zaytun di ruang media digital. Kebangkitan Islam di Indonesia tidak hanya terlihat dari peningkatan jumlah pemeluk Islam, tetapi juga dari ekspresi politik yang menonjol, seperti aksi Bela Islam di lapangan Monas Jakarta yang dihadiri ratusan ribu umat Islam. Para sarjana politik menyebut ini sebagai kebangkitan gerakan populisme Islam Indonesia, yang semakin kuat terutama sejak pemilihan presiden dan wakil presiden 17 April 2019, di mana kedua calon memperebutkan massa Islam. Ciri khas populisme Islam Indonesia adalah penggunaan bahasa politik yang berbasis agama Islam. Gerakan ini merupakan kritik yang wajar dalam negara demokrasi seperti Indonesia, dan merupakan bagian yang sehat, sah, dan legal dalam sistem hukum dan keadilan. Menganggap populisme Islam Indonesia sebagai ancaman atau makar adalah anggapan berlebihan yang tidak didukung oleh kenyataan sejarah dan realitas politik saat ini.¹⁰¹¹ Media digital tidak lagi dianggap sebagai alat teknologi yang sulit digunakan, melainkan memberikan kemudahan dalam berkomunikasi. Di era digital ini, komunikasi lebih banyak dilakukan melalui media berbasis teknologi. Namun, interaksi yang terjadi bersifat tidak langsung, sehingga mengurangi kelekatan emosional meskipun ekspresi perasaan dapat diwakili oleh ikon emosional. Teknologi berperan penting dalam memfasilitasi saluran komunikasi, terutama dalam penyiaran agama. Sebelum adanya teknologi, penyiaran dakwah bersifat sederhana dan dilakukan melalui pertemuan tatap muka di tempat ibadah atau komunitas. Saat ini, dakwah dapat diakses kapan saja dan di mana saja tanpa

¹⁰¹⁰ 3580-16560-2-PB.pdf

¹⁰¹¹ *Andi Eka Putra*. Populisme Islam: Tantangan atau Ancaman bagi Indonesia?. Jurnal Tapis. Jurnal aspirasi Politik Islam.. Vol.15.No.2(2019). UIN Raden Intan Lampung.
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/4236>

kehadiran fisik pemuka agama, melalui media komunikasi seperti YouTube dan platform virtual lainnya.¹⁰¹²

Dalam proses menjelaskan realitas sosial, politik di Indonesia masih rentan pemaksaan dengan adanya kekuatan untuk mendapatkan kekuasaan. Paradigma yang sudah terolah karena pembiasaan yang dilakukan di masyarakat Indonesia dan diksi kekuasaan yang bersifat kekuatan finansial, kekuatan pengikut, kekuatan *social framing*, kekuatan sosial media dan jaringan kerja. Bukan rahasia umum lagi ketika tokoh politik memiliki kekuatan finansial akan lebih diakui oleh calon pemilih karena di Indonesia suara dapat didulang melalui gerak uang di masyarakat. Tokoh politik yang hanya bermodal intelektual dan tidak memiliki kekuatan yang diakui masyarakat Indonesia maka akan dianggap lemah sehingga sulit memasuki dunia politik di Indonesia. Fenomena ini tanpa disadari dibentuk hingga terbentuk berkelanjutan menjadi budaya yang sudah menjadi pola turun menurun. Dalam dunia politik harus terbiasa "kotor" untuk dapat merayu rakyat sehingga memudahkan mendulang suara, "bermain bersih" akan menghasilkan kesia-siaan belaka. Ada atau tidanya intrik politik dalam kasus Al Zaytun, masih belumlah dapat dibuktikan secara jelas. Namun bergulirnya kasus Al Zaytun menjadi kabar yang spekulatif tentang adanya keterlibatan politik didalamnya. Namun berita yang masih berjalan dan hanya berfokus pada kasus penistaan agama. Berita pada kanal Viva online pada tanggal 4 Agustus 2023, dinyatakan bahwa Kemenag akan melakukan assesmen pendidikan pada para santri dan pendidik di ponpes Al Zaytun dan pada tanggal yang sama Panji Gumilang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Bareskrim. Menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan Mahfud MD, menyampaikan hasil rapat tentang nasib ponpes Al Zaytun. Salah satu keputusan itu adalah memberi tugas kepada menteri Agama RI untuk memberikan pendampingan kepada ponpes Al Zaytun, termasuk para santri dan tenaga pendidiknya.¹⁰¹³ Pada kanal Detik news, tanggal 4 Agustus 2023 dinyatakan ponpes Al Zaytun tidak dibubarkan.

Moderasi beragama sangat menekankan adanya komunikasi dan kerjasama antar kelompok beragama tanpa menghilangkan ritual ibadah masing-masing agama dan tanpa memaksakan konsep suatu agama pada agama lain. Karena setiap agama berporos pada kebaikan dan keadilan. Penerapan moderasi beragama memiliki konsep bagaimana menghormati dan bertoleransi pada perbedaan diantara kelompok beragama. Setiap pemeluk agama berhak memilih dan mengamalkan sesuai ajaran dan kepercayaan masing-masing. Dalam al Quran sudah dijelaskan makna moderasi beragama dalam surah Al Mumtahanah ayat 8

إِنَّمَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَتَلُواكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. (QS Al Mumtahanah:8)¹⁰¹⁴.

Pada perilaku moderasi beragama masih pada sebatas permukaan memahami moderasi beragama namun jika sudah terbentuk sikap moderasi beragama maka sudah terbentuknya *insight*(pemahaman) dengan sikap-sikap mengadaptasi pada budaya, etika dan keyakinan pada keyakinan kelompok-kelompok beragama. Penyadaran kognitif akan

¹⁰¹² Wening Purbatin Palupi Soenjoto Ustad Virtual : Pola Dakwah Kekinian Di Era Milineal. Proceedings of ISCUSHIT.2020 <https://vicon.uin-suka.ac.id/index.php/iscushith/article/view/482/219>

¹⁰¹³ <https://bandung.viva.co.id/news/27614-kemenag-akan-asesmen-pendidikan-santri-dan-tenaga-pendidik-di-pesantren-al-zaytun>

¹⁰¹⁴ QS Al Mumtahanah:8

penerimaan moderasi beragama berorientasi pula pada kebaikan diri, seperti pada Al Qur'an surah Al Anfal ayat 70

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمْرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

Artinya: Wahai Nabi (Muhammad)! Katakanlah kepada para tawanan perang yang ada di tanganmu, "Jika Allah mengetahui ada kebaikan di dalam hatimu, niscaya Dia akan memberikan yang lebih baik dari apa yang telah diambil darimu dan Dia akan mengampuni kamu." Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (Al Anfal ayat 70)¹⁰¹⁵

Sikap moderasi beragama tidak ahanya pada pembentukan kognitif saja namun dibutuhkan proses pembentukan pula pada ranah afektif dan psikomotor, seperti yang dijelaskan Al Quran surah Al Isra ayat 7:

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا

Artinya: "Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri," (QS Al Isra ayat 7)¹⁰¹⁶

Pada kasus kontroversi Al Zaytun mengenai penistaan agama masih dalam tahap penyidikan berdasarkan pencarian pembuktian dari video-video maupun penerapan ritual agama yang dilakukan ponpes Al Zaytun, masih belum dapat dinilai sebagai penistaan agama seperti yang diutarakan anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman mengingatkan Kementerian Agama untuk menggunakan pendekatan komunikatif dan dialogis dalam mengusut polemik kegiatan Pondok Pesantren Al Zaytun, Indramayu, Jawa Barat. Sebaliknya, dia mengingatkan publik agar menghindari sikap reaktif dan penggunaan cara-cara kekerasan menyoal polemik tersebut. "Al Zaytun kan ada bagiannya di Kemenag yang soal aliran sesat dan sebagainya, silakan saja dikedepankan pendekatan yang seperti saat ini pendekatan yang komunikatif dialogis".¹⁰¹⁷

Kasus Al-Zaytun dikaitkan dengan Negara Islam Indonesia (NII), sebagaimana dilaporkan oleh Detik News pada 5 Juli 2023. Diketahui bahwa Ponpes Al-Zaytun sebelumnya bernama Yayasan NII, meskipun saat ini fokus penyelidikan terkait pidana umum. Ponpes ini menjadi sorotan karena dugaan penodaan agama dan tindakan pidana oleh individu di dalamnya, mendorong sejumlah pihak untuk mendesak penyelidikan lebih lanjut. Keresahan masyarakat, yang diwakili oleh para pendemo, tampak bersifat sementara dan menyerahkan penanganan kepada pihak berwenang. Panji Gumilang, pimpinan Ponpes, telah diperiksa oleh Bareskrim Polri. Menko Polhukam Mahfud MD mengonfirmasi bahwa Al-Zaytun dulunya bernama Yayasan NII, namun kini telah berubah menjadi Yayasan Pendidikan Al-Zaytun.¹⁰¹⁸

Ponpes Al zaytun pun dikaitkan dengan adanya kekayaan dari beberapa donatur yang masih samar secara identitasnya dan pembekuan rekening-rekening bank yang mengalirkan dana ke ponpes Al Zaytun. Isu populisme pun terjadi, munculnya berita di media digital yang menyatakan bahwa Al Zaytun didanai "orang-orang tertentu" yang memiliki kepentingan kelompok. Tahun 2024 dinilai sebagai tahun politik dengan adanya pemilu. Segala hal yang memicu pendekatan diskursif yang menekankan populisme sebagai alat konstruksi politik dalam bentuk penyatuan aspirasi homogeni dengan kondisi

¹⁰¹⁵ QS, Al Anfal ayat 70

¹⁰¹⁶ QS Al Isra ayat 7

¹⁰¹⁷ <https://news.republika.co.id/berita/rwvb2r377/anggota-dpr-jangan-asal-tuduh-alzaytun-kelompok-nii>

¹⁰¹⁸ <https://news.detik.com/berita/d-6808100/terungkap-ponpes-al-zaytun-dulunya-yayasan-nii>

masayarakat Indonesia yang heterogen. Pemilu 2024 yang akan diselenggarakan 14 Februari 2024 secara serentak di Indonesia menjadi pesta demokrasi yang tidak hanya dilakukan secara fisik dalam bentuk kegiatan pemungutan suara memilih presiden dan wakil presiden, akan terjadi pula ajang adu komentar di media sosial. Adu komentar dan adu *meme* di media sosial menimbulkan ragam respon warganet. Dan jelang pemilu 2024 ini ajang adu komentar terhadap calon presidenpun sudah ramai menjadi perbincangan di media digital. Pembentukan opini dan *framing* masing-masing capres begitu riuh di media digital.

Di era komunikasi digital saat ini, informasi dalam media digital yang mudah diakses akan menimbulkan banyak respon dan akan sangat berdampak menimbulkan ragam respon dan kontroversi jika tidak ditindaklanjuti secara objektif dan matang oleh Pemerintah maupun pihak-pihak yang kompeten dan terkait kasus Al Zaytun. Bagaimana memaknai moderasi agama tanpa adanya erosi aqidah dan regresi aqidah. Pemerintah menjadikan moderasi beragama sebagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Pola moderasi beragama pun sebenarnya sudah ada dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia namun dengan adanya media digital maka respon memaknai moderasi beragama pun menjadi beragama. Moderasi beragama jangan sampai disalahartikan jika terjadi penyimpangan dan menimbulkan kemunkaran. Karena hal-hal yang bersifat munkar jika dibiarkan akan menimbulkan penyimpangan semakin melebar sehingga keluar dari syariat agama Islam. Moderasi beragama pun bukan berarti menghalalkan segala cara atau memaklumi cara-cara yang keluar dari aqidah dan syariat agama.

Terminologi "qoulan" dalam konteks virtual berbentuk kata-kata mutiara, motivasi, dan dakwah yang disampaikan oleh para kyai dan ustad melalui kanal YouTube dan streaming. Indonesia, dengan budaya kolektif dan dominan pola komunikasi objek, cenderung lebih mudah terjadi penggiringan opini melalui media sosial. Era milenial merupakan fase yang banyak dipengaruhi oleh kebudayaan sebagai hasil dari semakin padatnya jaringan komunikasi daerah, nasional, dan internasional. Amalgamasi antara berbagai kebudayaan kadang berlangsung lancar, lembut, tetapi tidak jarang pula berlangsung melalui konflik-konflik yang sulit dileraikan. Terjadilah konflik-konflik budaya dengan kemunculan situasi sosial yang khaotis dan kelompok-kelompok sosial yang tidak bisa dirukunkan, sehingga mengakibatkan banyak kecemasan, ketegangan, dan ketakutan di kalangan rakyat banyak. Hal ini banyak terjadi dalam komunikasi di grup-grup sosial media.¹⁰¹⁹ Munculnya berita Al Zaytun yang menjadi viral dan dinilai kontroversi melalui media digital yang akhirnya tersebar. Kekuatan media digital memiliki kekuatan kuat dalam mempengaruhi bahkan mampu menggiring opini masyarakat.

Pada kasus Al Zaytun akan rentan terjadinya populisme jika ada pihak-pihak tertentu yang mengatasnamakan kepentingan rakyat yang dilakukan oleh elite politik sebagai bentuk pendekatan politik. Dapat dimaklumi secara nalar akal sehat dengan melihat jumlah santri Al Zaytun yang berjumlah ribuan, diberhentikan secara mendadak kegiatan belajar mengajar akan menjadi masalah baru. Kasus penistaan agama yang menjadi isu kontroversi di ruang publik dapat dimaknai sebagai bentuk politik identitas yang dilakukan ponpes Al Zaytun. Politik identitas yang dirangkum dalam pemaknaan moderasi beragama. Ruang digital yang memediakan narasi publik dalam merespon kasus ponpes Al Zaytun memang dapat menjadi intrik politik jelang pemilu 2024. Berita akan makin memanas dengan isu-isu politik sebagai pematik situasi. Komunikasi yang terjadi bagaimana *snow ball* jika masuk

¹⁰¹⁹ Wening Purbatin Palupi Soenjoto. Fenomena Ghibah Virtual Pada Komunikasi Era Milenial Menurut Perspektif Islam. *Ancoms Kopertais* 4.Vol.3.No.1(2019).<http://proceedings.kopertais4.or.id/index.php/ancoms/article/view/239/242>
<http://proceedings.kopertais4.or.id/index.php/ancoms/article/view/239/242>

ruang digital dengan ragam komentar warganet. Masyarakat Indonesia yang mudah digerakkan dengan penggiringan asumsi yang *random* dan *absurd* menjadi sajian menghipnotis membuat candu dan menggugah selera berselancar di media sosial.

Figur seorang kyai sangat mempengaruhi kehidupan dan tumbuh kembangnya sebuah pondok pesantren, sikap tawaddu para santri yang mempercayai ajaran-ajaran dari kyai menjadi acuan para santri menimba ilmu agama. Ponpes Al Zaytun memiliki figur yang dianggap tokoh agama yang dikagumi sehingga citra yang terbentuk mampu membuat para santri patuh dalam penerapan pola ibadah di Al Zaytun. Apakah betul al zaytun terlibat intrik politik menjelang pemilu 2024 memang membutuhkan penelusuran yang memiliki proses berliku dengan meninjau banyak faktor dan pihak-pihak terkait didalamnya membutuhkan pengamatan yang tidak bisa cepat mengambil kesimpulan. Berdasarkan berita terbaru tentang pimpinan ponpes Panji Gumilang yang dilansir pada kanal DetikNews 7 Agustus 2023 dinyatakan bahwa ada dugaan terhadap Panji Gumilang terlibat dalam pencucian uang.¹⁰²⁰ Berita yang bergulir pun, bukan lagi berpusat pada kasus penistaan agama seperti pernyataan Menteri agama yang dilansir pada kanal Detik Update pada tanggal 5 Agustus 2023 Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menanggapi kasus penodaan agama oleh Panji Gumilang. Yaqut menyebut jika penodaan agama belum tentu penyesatan¹⁰²¹, penyidikan menemukan temuan-temuan baru tentang ponpes Al Zaytun dan Panji Gumilang yang pada akhirnya resmi ditahan di Rutan Bareskrim Polri Kebayoran Baru pada tanggal 2 Agustus 2023 hingga 20 hari kedepan yaitu 21 Agustus 2023. Berita tentang Al Zaytun dan Panji Gumilang akan terus bergulir dengan banyak temuan baru yang mungkin saja ada kaitannya dengan drama politik jelang pemilu 2024. Namun beritapun akan segera redup dan terlupa jika tidak ada lagi pihak yang tertarik maupun tidak ada lagi pihak yang menjadi sumber berita yang dapat membakar berita lebih panas lagi dan mempengaruhi masyarakat terutama warganet. Minimnya literasi, mudah dipengaruhi, kekuatan media sosial menjadi penyebab mudahnya masyarakat Indonesia terbawa hoax.

Munculnya politik identitas pada kasus Al Zaytun akan membawa pemetaan baru untuk dikaji ulang tentang pendidikan pesantren yang dianggap berbeda dengan dengan pesantren lainnya yang dinilai sesuai penerapan ibadah berdasarkan syariat agama Islam. Karena munculnya politik identitas diawali adanya perbedaan yang tidak seperti biasanya dan dianggap menyimpang jika memang sudah terbukti akan adanya penyimpangan. Selain masalah politik, identitas, dan status kewarganegaraan, orientasi politik juga menjadi isu serius di kalangan generasi muda di Indonesia yang terus berubah. Politik identitas didasarkan pada kesamaan sosial dalam masyarakat dan sering digunakan untuk mendapatkan suara dalam pemilihan demokrasi di berbagai negara. Politik identitas ini berakar pada stereotip yang dibentuk melalui perspektif primordialisme. Konsep ini, seperti yang dijelaskan oleh Aristoteles, berarti "berperang ke luar dan konsolidasi ke dalam". Karena itu, politik identitas sering diwarnai konflik, baik frontal maupun dialektik, dan selalu berada dalam ketegangan antara superioritas dan inferioritas, serta antara mayoritas dan minoritas.¹⁰²² Dapat ditenggarai karakteristik politik di Indonesia layaknya politik "balas dendam" yang turun menurun, mencari kelemahan lawan untuk menjatuhkan. Keperpihan kelompok yang dikelompokkan berdasarkan partai

¹⁰²⁰ <https://20.detik.com/detikupdate/20230807-230807119/bareskrim-periksa-panji-gumilang-terkait-dugaan-pencucian-uang>

¹⁰²¹ <https://20.detik.com/detikupdate/20230803-230803106/mahfud-imbau-warga-pesantren-al-zaytun-tak-panik>

¹⁰²² **Wening Purbatin Palupi Soenjoto. Eksploitasi Isu Politik Identitas terhadap Identitas Politik pada Generasi Milineal Indonesia di Era 4.0. *Journal of Islamic Studies and Humanities* Vol. 4, No. 2 (2019) 187-217**
DOI: <http://dx.doi.org/10.21580/jish.42.5223>
<https://journal.walisongo.ac.id/index.php/JISH/article/view/5223/2547>

politik. Namun disayangkan, partai politik bukan menjadi wadah yang mampu mencetak kader-kader politik yang berkualitas dan berakhlak mulia. Para politisi yang memiliki kepentingan pribadi pun menggunakan atas nama rakyat untuk merayu rakyat dengan janji-janji manis. Pengolahan kreatifitas kata, kalimat dan penokohan tokoh politik yang mampu menggerakkan ranah kognitif dan psikologis rakyat kemudian digerakkan pula dengan kemampuan kekuatan media sosial maupun platform-platform digital itulah yang menjadi ciri khas politik di Indonesia. Perang komentar warganet menjadi sarana strategis yang mudah ditanggapi oleh pihak-pihak berkepentingan terutama pada masa mendekati pemilu dan pemilihan presiden. Politik uang, politik balas dendam dan politik balas budi merupakan budaya politik di Indonesia.

Kata politik berasal dari kata *politic* (Inggeris) yang menunjukkan sifat pribadi atau perbuatan. Secara leksikal kata sifat tersebut berarti *acting or judging wisely, well judged*. Kata ini diambil dari kata latin *politicus*. *Politicus* yang berarti *relating to citizen*¹⁰²³. Tidak ada satupun politisi yang betul-betul 100% melakukan demi rakyat dan tanpa uang untuk merayu rakyat. Sebagian besar para politisi sebenarnya memahami bahwa dampak kegiatan politik harusnya berpihak pada rakyat dalam kebermanfaatannya bersama namun cenderung tidak mau melaksanakannya, disebabkan orientasi berpolitiknya didominasi oleh tujuan mengejar kenikmatan duniawi yang semu (*mataaul gurur*). Dan pada akhirnya, masyarakat mampu mempelajari secara politik praktis tentang polemik Al Zaytun ini, penggiringan opini di komunikasi digital begitu ampuh menjadi snowball lalu hilang kemudian dapat heboh kembali dengan pemunculan berita-berita yang mengusik komentar warganet. Namun dapat hilang begitu saja karena masyarakat jenuh tanpa ada penyelesaian yang jelas. Bentuk politik yang terjadi di Indonesia, bersifat eforia sementara, intrik-intrik dan pengalihan isu akan selalu ada. Polemik Al Zaytun pun menguap seiring hilangnya pemberitaan yang lainnya. Kasusnyapun tidak terselesaikan. Masyarakatpun mulai melupakannya.

PENUTUP

Pembingkaiian berita melalui media digital memudahkan terjadi viral dan penggiringan opini sehingga menimbulkan ragam respon. Memaknai dan memahami beragama dalam *framing* berita kontroversi Al Zaytun memang tidak dapat dihindari adanya konflik, perbedaan pola ibadah yang dilakukan ponpes Al Zaytun dalam konsep kognitif masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim, menimbulkan kontroversi dalam pemahaman masyarakat awam yang sudah mengikuti penerapan beribadah sesuai ajaran agama Islam semestinya. Kontroversi Al Zaytun pun dianggap intrik politik jelang pemilu 2024. Menjadi sebuah berita yang membentuk ragam opini dan konflik yang masih belum ditemukan solusi yang mengandung *win win solution*. Dibutuhkan penyelesaian dengan penelusuran bukti dan data yang akurat. Peran pemerintah, masyarakat, pihak-pihak terkait terutama Kemenag RI dalam penyelesaian kasus Al Zaytun yang rentang dikaitkan dengan isu-isu politik jelang pemilu 2024.

Pemerintah, Kemenag RI dan semua pihak yang terkait sebagai payung pengayom dapat menciptakan *trust building* yang dapat memberikan pembinaan dan pendampingan terutama pada kasus ponpes Al Zaytun ini agar tidak menjadi *snow ball* yang dapat menggulung opini dan ragam respon masyarakat yang terwadahkan dalam ruang media digital sehingga penyelesaian masalah dapat memberikan hikmah dan pembelajaran bagi masyarakat Indonesia dalam dunia pendidikan dan pondok pesantren.

¹⁰²³ Abdul Muin Salim, *Konsep Kekuasaan Politik Dalam Alquran* (Cet. III; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 34

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Eka Putra. Populisme Islam: Tantangan atau Ancaman bagi Indonesia?. Jurnal Tapis. Jurnal aspirasi Politik Islam..Vol.15.No.2(2019). UIN Raden Intan Lampung. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/4236>
- As'ary, Zubaidi Habibullah. 1996. Moralitas Pendidikan Pesantren. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta.
- Ausop, Asep Zaenal. 2011. Ajaran dan Gerakan NII Kartosowirjo, NII KW IX dan Ma'had Al-Zaytun. Bandung: Tafakur.
- Azra, Azyumardi. 1999. Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru. Jakarta: Logos.
- Baedowi, Ahmad (ed). 2011. Al-Zaytun The Untold Stories. Investigasi terhadap Pesantren Paling Kontroversial di Indonesia. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Buchori, Mochtar. 1989. Pendidikan Islam di Indonesia: Problema Masa Kini dan Perspektif Masa Depan dalam Islam Indonesia Menatap Masa Depan. Muntaha Azhari dan Abdul Mun'im Saleh (eds). Jakarta: P3M.
- Budiyanto, Sidik. 2006. Mewaspada NII Zaytun di Kampus Kita. Jakarta: Kalamnet Publishing.
- Nisa Chaerani Hisan. Analisa Wacana Berita Penyekapan di Pondok Pesantren Al Zaytun dalam Majalah Detik Online edisi 58 (07-13 Januari 2013).
- Roni Tabroni. Sistem Pendidikan Satu Pipa Ma'had Al-Zaytun Indramayu.Vol.13.No.2 (2018).Jurnal Edukasia.<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Edukasia/article/view/3580>
- Wening Purbatin Palupi Soenjoto. Fenomena Ghibah Virtual Pada Komunikasi Era Milenial Menurut Perspektif Islam.Ancoms Kopertais 4. Vol.3.No.1(2019).<http://proceedings.kopertais4.or.id/index.php/ancoms/article/view/239/242>
- Wening Purbatin Palupi Soenjoto Ustad Virtual : Pola Dakwah Kekinian Di Era Milineal.Proceedings of ISCUSHIT.2020 <https://vicon.uin-suka.ac.id/index.php/iscushith/article/view/482/219>
- Wening Purbatin Palupi Soenjoto. Eksploitasi Isu Politik Identitas terhadap Identitas Politik pada Generasi Milineal Indonesia di Era 4.0.Journal of Islamic Studies and Humanities Vol. 4, No. 2 (2019) 187-217 DOI: <http://dx.doi.org/10.21580/jish.42.5223>

Internet:

- Admin."Kontroversi Cara Sholat Dan Jumat DiAl-Zaytun Ini Respons Waketum Mui".2023.Diakses 23 Juli 2023.<https://mui.or.id/berita/52684/kontroversi-cara-sholat-dan-jumat-di-al-zaytun-ini-respons-waketum-mui/>
- Adrial Akbar"Terungkap Ponpes Al-Zaytun Dulunya Yayasan NII" .2023.Diakses 4 Agustus 2023.<https://news.detik.com/berita/d-6808100/terungkap-ponpes-al-zaytun-dulunya-yayasan-nii>
- AGN.Insertlive.Wawancara Eksklusif." Soal Salam Yahudi Al Zaytun:Kita Menganut Aliran Toleransi.2023.Diakses 23 Juli 2023.<https://www.insertlive.com/hot-gossip/20230623104754-7-312899/soal-salam-yahudi-al-zaytun-kita-menganut-aliran-toleransi>
- Aulia Rahmah" Kemenag Akan Asesmen Pendidikan Santri Dan Tenaga Pendidik Di Pesantren Al-Zaytun".2023.Diakses 4 Agustus 2023.<https://bandung.viva.co.id/news/27614-kemenag-akan-asesmen-pendidikan-santri-dan-tenaga-pendidik-di-pesantren-al-zaytun>

- Detik Jabar-Detik Sumut."Heboh Pria dan Wanita Satu Saf Saat Salat Id Di Ponpes Al Zaytun ".2023.Diakss 23 Juli 2023.<https://www.detik.com/sumut/berita/d-6687732/heboh-pria-dan-wanita-satu-saf-saat-salat-id-di-ponpes-al-zaytun>
- Teguh Firmansyah." Anggota-Dpr-Jangan-Asal-Tuduh-Alzaytun-Kelompok-Nii".2023.Diakses 4 Agustus 2023.<https://news.republika.co.id/berita/rwvb2r377/anggota-dpr-jangan-asal-tuduh-alzaytun-kelompok-nii>
- Ruth Meliana." Mengenal Sinagoge, Tempat Ibadah Orang Yahudi Diduga Ada di Al Zaytun".2023.Diakses 25 Juli 2023.
<https://www.suara.com/news/2023/07/09/140811/mengenal-sinagoge-tempat-ibadah-orang-yahudi-diduga-ada-di-al-zaytun>
- Steffani Dina." Dirjen IKP: Pencegahan Hoax Tanggung Jawab Bersama.2023.Diakses 23 Juli 2023. https://www.kominfo.go.id/content/detail/11354/dirjen-ikp-pencegahan-hoax-tanggung-jawab-bersama/0/sorotan_media
- <https://20.detik.com/detikupdate/20230807-230807119/bareskrim-periksa-panji-gumilang-terkait-dugaan-pencucian-uang>
- <https://20.detik.com/detikupdate/20230803-230803106/mahfud-imbau-warga-pesantren-al-zaytun-tak-panik>